

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Nurul Afrianti

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka
e-mail: hildayulianti21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier sederhana (Product Moment), dibantu oleh perangkat lunak SPSS versi 22. Lokasi penelitian mencakup tiga desa, yaitu Desa Lamoiko, Desa Pewisoa Jaya, dan Desa Puundaipa. Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan dokumentasi, dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan 30 responden, yaitu aparat desa yang masih aktif. Uji kualitas data dilakukan menggunakan uji validitas Pearson Correlation, sementara pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji t. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ($\text{Sig} = 0,815$; $p > 0,05$). Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka.

Kata kunci— Akuntabilitas pengelolaan dana desa, Kompetensi aparatur desa, Partisipasi masyarakat, SPSS

Abstract

This study aims to analyze the influence of village officials' competence and community participation on the accountability of village fund management in Tanggetada Subdistrict, Kolaka Regency. The research employs a descriptive quantitative approach using simple linear regression analysis (Product Moment), assisted by SPSS version 22 software. The study was conducted in three villages: Lamoiko, Pewisoa Jaya, and Puundaipa. Data were collected through questionnaires, interviews, and documentation, with purposive sampling resulting in 30 respondents, consisting of active village officials. The data quality was tested using Pearson Correlation validity tests, while hypothesis testing was conducted using adjusted determination coefficient tests and t-tests. This research was carried out in December 2023. The results indicate no significant influence of village officials' competence and community participation on the accountability of village fund management ($\text{Sig} = 0.815$; $p > 0.05$). Based on these findings, it can be concluded that the competence of village officials and community participation do not significantly affect the accountability of village fund management in Tanggetada Subdistrict, Kolaka Regency.

Keywords— Accountability of village fund management, Community participation, Simple linear regression, SPSS, Village officials' competence

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional. Salah satu cara untuk melakukan pembangunan tersebut adalah dengan cara memberikan dana bagi desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk mengelola dan menjalankan system pemerintahannya sendiri". Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Pembangunan yang direncanakan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia.

Pengelolaan dana desa merupakan aktivitas sosial empiris yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa selain sebagai pedoman dalam pengelolaan pemerintahan dan aturan di desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, memenuhi kebutuhan dasar, menciptakan sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Nurhatifa et al., 2021).

Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dalam jumlah besar untuk mendukung program dan kebijakan baru. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), selama lima tahun terakhir, total anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun, dengan peningkatan setiap tahunnya. Rincian anggaran tersebut adalah Rp 20,67 triliun pada tahun 2015, Rp 46,98 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun pada tahun 2017, Rp 60 triliun pada tahun 2018, dan Rp 70 triliun pada tahun 2019.

Pengelolaan dana desa harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, yang berarti keterbukaan dan transparansi dalam mempertanggungjawabkan setiap aktivitas kepada pihak lain. Akuntabilitas ini mencakup sikap transparan yang memungkinkan

masyarakat atau pihak berwenang untuk menilai proses dan hasil pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas (accountability) adalah konsep etika yang erat kaitannya dengan administrasi publik pemerintahan, mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini memiliki berbagai makna, sering kali digunakan sebagai sinonim untuk istilah seperti responsibility (tanggung jawab), questioned (dapat dipertanyakan), blamed (dapat dipersalahkan), dan no freedom (tidak memiliki kebebasan). Istilah ini berhubungan dengan harapan untuk menjelaskan berbagai aspek dalam administrasi publik dan pemerintahan. Akuntabilitas telah menjadi pusat diskusi terkait problematika di sektor publik, lembaga nirlaba, yayasan, hingga perusahaan.

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Kolaka terletak di Kecamatan Kolaka. Kabupaten ini telah mengalami dua kali pemekaran, yaitu pembentukan Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka Timur, yang terakhir disahkan pada akhir tahun 2012. Setelah pemekaran, wilayah Kabupaten Kolaka mencakup daratan seluas 3.283,59 km² dan perairan laut yang diperkirakan seluas ± 15.000 km². Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Kolaka tercatat sebanyak 238.352 jiwa dengan kepadatan 73 jiwa/km². Wilayah ini terbagi ke dalam 12 kecamatan yang mencakup daratan dan kepulauan.

Kecamatan Tanggetada, salah satu kecamatan di Kabupaten Kolaka, merupakan lokasi penelitian ini. Kecamatan ini menerima alokasi anggaran berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dengan total dana sebesar Rp 38.663.841.300 menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, beberapa desa di Kecamatan Tanggetada mengalami keterlambatan dalam pencairan dana desa. Salah satu penyebab utama keterlambatan ini adalah belum diselesaikannya laporan pertanggungjawaban dari periode sebelumnya, yang dipengaruhi oleh rendahnya kompetensi aparatur desa. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa untuk memastikan transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis beberapa hal. Pertama, apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanggetada. Kedua, apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketiga, apakah kompetensi aparat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanggetada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, karena bertujuan untuk menjawab respons responden atas pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner, yang diukur menggunakan skala Likert, serta memberikan penjelasan terkait objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Objek penelitian meliputi aparat desa di Desa Lamoiko, Desa Puundaipa, dan Desa Pewisoa Jaya, dengan fokus untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa tersebut.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian mencakup seluruh aparat pengelola dana desa di Desa Lamoiko, Desa Puundaipa, dan Desa Pewisoa Jaya, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk uji normalitas data, uji koefisien korelasi, dan analisis regresi linear berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian Uji Instrumen Penelitian

Penelitian ini melibatkan 30 responden yang merupakan aparat pengelola dana desa di Kecamatan Tanggetada. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah laki-laki sebesar 67%, sedangkan perempuan sebesar 33%. Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir SMA sebesar 80%, diikuti oleh S1 sebesar 20%, sementara tidak ada responden dengan jenjang pendidikan SMP atau SD. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang usia 21-30 tahun sebesar 43,3%, diikuti oleh rentang usia 41-50 tahun sebesar 33,3%, usia 31-40 tahun sebesar 17,7%, dan usia 51-60 tahun sebesar 6,7%. Dengan demikian, aparat pengelola dana desa di Kecamatan Tanggetada didominasi oleh laki-laki, berpendidikan SMA, dan berusia muda, yaitu 21-30 tahun.

3.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan data berdasarkan sampel angket yang telah dikumpulkan, terdiri dari 30 responden yang datanya dinyatakan valid dan tidak terdapat data yang salah. Berdasarkan analisis, nilai rata-rata (mean) pada setiap item angket untuk Kompetensi Aparatur (KA) adalah sebagai berikut: KA1 (5,00), KA2 (5,00), KA3 (4,23), KA4 (4,17), KA5 (4,77), KA6 (4,93), KA7 (4,90), KA8 (4,97), KA9 (4,93), dan KA10 (4,57). Nilai tengah (median) menunjukkan sebagian besar responden memilih jawaban "setuju" (4), kecuali pada KA1 dan KA2 yang menunjukkan "sangat setuju" (5). Modus pada setiap item juga menunjukkan nilai empat. Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Lamoiko pada 20 Januari 2024, aparat pengelola dana desa di Desa Lamoiko dinilai telah memahami siklus akuntansi serta mampu menyusun dan menyajikan laporan dengan baik. Hal serupa disampaikan oleh kepala desa dari Desa Pewisoa Jaya dan Desa Puundaipa, yang menegaskan bahwa aparat mereka memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola dana desa. Hal ini juga tercermin dari nilai rata-rata angket sebesar 4,90. Selain itu, wawancara mengungkapkan bahwa pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kompetensi aparat melalui pelatihan, termasuk peningkatan kemampuan di bidang teknologi untuk mendukung pengelolaan dana desa secara lebih efektif.

3.2.2 Partisipasi Masyarakat

Tabel 1 Mean, Median, Modus

	N	Mini mum	Maxi mum	Me an	Std. Deviati on
A1	30	5	5	5.0 0	.000
A2	30	5	5	5.0 0	.000
A3	30	5	5	5.00	.000
A4	30	5	5	5.00	.000
A5	30	5	5	5.00	.000
Valid N (listwise)	30				

Berdasarkan table 1 di atas, data yang dinyatakan valid berjumlah 30 sampel, tanpa adanya data yang salah. Rata-rata (mean) dari setiap item pada angket partisipasi masyarakat (PM) adalah sebagai berikut: PM1 (4,77), PM2 (4,77), PM3 (4,73), PM4 (4,37), PM5 (4,33), dan PM6 (4,33). Median atau nilai tengah untuk seluruh item adalah empat, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih "setuju". Modus atau nilai yang paling sering muncul adalah lima untuk PM1, PM2, PM3, dan PM6, serta empat untuk PM4 dan PM5. Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Puundaipa pada 21 Januari 2024, beliau menyatakan bahwa masyarakat desa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait penyusunan program-program penggunaan dana desa. Hal serupa juga diungkapkan oleh kepala Desa Lamoiko dan Pewisoa Jaya, yang menjelaskan bahwa masyarakat mereka turut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa di ketiga lokasi penelitian memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan pendapat mereka terkait prioritas pembangunan, pemberdayaan, dan kebutuhan desa yang dapat dianggarkan melalui dana desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD), dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku.

3.2.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif untuk variabel kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa kompetensi aparat (X1) memiliki nilai minimum sebesar 49 dan nilai maksimum sebesar 79, dengan rata-rata 62,97. Standar deviasi untuk kompetensi aparat adalah

8,672, menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam kemampuan aparat desa. Sementara itu, untuk partisipasi masyarakat (X2), nilai minimum adalah 24 dan maksimum 30, dengan rata-rata 27,30. Standar deviasi partisipasi masyarakat sebesar 1,725 menunjukkan variasi yang lebih kecil dibandingkan dengan kompetensi aparat.

Untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), nilai minimum dan maksimum sama-sama sebesar 25, dengan rata-rata juga sebesar 25. Standar deviasi sebesar 0,000 menunjukkan data akuntabilitas bersifat seragam tanpa adanya variasi di antara responden. Hasil ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat variasi dalam kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat, tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak menunjukkan perbedaan antarresponden dalam penelitian ini.

3.2.4 Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum data dianalisis, dilakukan pengujian terhadap instrumen penelitian untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas dan uji linearitas.

3.2.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kriteria normalitas terpenuhi jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig > 0,05). Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov melalui program SPSS versi 22 menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal ini memungkinkan untuk melanjutkan ke tahap analisis berikutnya, termasuk uji linearitas.

3.2.4.2 Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat hubungan linier antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji F pada taraf signifikansi 5%. Hubungan dianggap linier jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig > 0,05). Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas

pengelolaan dana desa memiliki nilai Sig. deviation from linearity sebesar 0,438 ($> 0,05$), sehingga hubungan ini dapat dikatakan linier. Selain itu, hubungan antara partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai Sig. deviation from linearity sebesar 0,737 ($> 0,05$), yang juga menunjukkan hubungan linier. Dengan demikian, kedua variabel bebas memiliki hubungan linier dengan variabel terikat, memungkinkan analisis lebih lanjut dilakukan.

Tabel 2 Hasil Uji Linearitas Pada Partisipasi Masyarakat (X_2)

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.66353922
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.104
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

3.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis korelasi Product Moment untuk mengetahui hubungan antara kompetensi aparat desa, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana hubungan antara variabel bebas (kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat) dengan variabel terikat (akuntabilitas pengelolaan dana desa).

Tabel 3 Korelasi kompetensi aparat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa

		Kompetensi	
		Aparat Desa (X_1)	Akuntabilitas (Y)
Kompetensi Aparat Desa (X_1)	Pearson Correlation	1	.375
	Sig. (2-tailed)		.041
	N	30	30
Akuntabilitas (Y)	Pearson Correlation	.375 ^a	1
	Sig. (2-tailed)	.041	
	N	30	30

Hasil perhitungan korelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang menunjukkan tingkat hubungan (positif/negatif) dan kekuatan hubungan (kuat/lemah) antara variabel-variabel yang diuji. Nilai korelasi yang diperoleh akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai keterkaitan antara variabel-variabel penelitian.

Hasil analisis korelasi **Product Moment** menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi aparat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada tabel korelasi, diperoleh koefisien sebesar 0,375 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,041 < 0,05$), maka **H_a diterima** dan **H_o ditolak**, yang berarti kompetensi aparat desa memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, hasil perbandingan r_{hitung} dengan r_{tabel} mendukung kesimpulan ini. Dengan $r_{hitung}=0,375$ dan $r_{tabel}=0,349$ pada taraf signifikansi 5% untuk 30 subjek, diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($0,375 > 0,349$). Dengan demikian, hasil analisis mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan signifikan antara kompetensi aparat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Analisis ini dilakukan menggunakan SPSS 22, yang memperkuat kesimpulan bahwa kompetensi aparat desa memengaruhi akuntabilitas secara signifikan.

Hasil analisis korelasi **Product Moment** menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada tabel korelasi, diperoleh koefisien sebesar -0,189 dengan nilai signifikansi sebesar 0,317. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,317 > 0,05$), maka **H_a diterima** dan **H_o ditolak**, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil perbandingan r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% untuk 30 subjek, menunjukkan bahwa $r_{hitung} = -0,189$ lebih kecil dari $r_{tabel}=0,349$, yang mendukung kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat berhubungan signifikan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Analisis ini dilakukan menggunakan SPSS 22.

Koefisien determinan R^2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana model penelitian mampu menjelaskan variabel terikat (akuntabilitas pengelolaan dana desa). Dari

hasil perhitungan, diperoleh nilai $R^2=0,183$, yang berarti bahwa 18,3% dari variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel bebas, yaitu kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat. Sisanya, sebesar 81,7%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Dengan demikian, model penelitian ini memiliki kemampuan terbatas dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Uji T Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel, serta melihat taraf signifikansi (p-value). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Berikut hasil uji t parsial:

a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji menunjukkan nilai thitung sebesar 2,207 dan ttabel sebesar 0,349, dengan nilai signifikansi sebesar 0,36 (> 0,05). Karena nilai thitung > ttabel tetapi nilai signifikansi > 0,05, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji menunjukkan nilai thitung sebesar 1,184 dan ttabel sebesar 0,349, dengan nilai signifikansi sebesar 0,247 (> 0,05). Karena nilai thitung > ttabel tetapi nilai signifikansi > 0,05, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari hasil uji t parsial ini, dapat disimpulkan bahwa baik kompetensi aparatur desa maupun partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara individu terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4 Hasil uji parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.267	3.786		6.673	.000
Kompetensi Aparat Desa (X1)	.056	.025	.384	2.207	.036
Partisipasi Masyarakat (X2)	-.152	.128	-.206	1.184	.247

3.4.2 Uji F (Simulatif)

Dari analisis yang disajikan, hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung (0,056) lebih kecil dari F tabel (3,35) pada taraf signifikansi 5%, dan nilai p (0,815) lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya, kedua variabel tersebut secara bersama-sama tidak berkontribusi secara signifikan dalam menjelaskan variabilitas dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, koefisien determinasi (R Square) yang sebesar 0,183 mengindikasikan bahwa hanya 18,3% variabilitas dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dijelaskan oleh model yang melibatkan kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat, sementara 81,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan memadai, mengingat nilai r hitung semua item angket lebih besar dari r tabel, dan koefisien reliabilitas yang diperoleh menunjukkan nilai yang dapat diterima. Hal ini menegaskan bahwa instrumen yang digunakan valid dan reliabel untuk mengukur variabel yang diteliti dalam konteks ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan data penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,36. Partisipasi masyarakat juga memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,247. Secara simultan, kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kecenderungan pengaruh positif, dampaknya belum cukup signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara substansial.

5. SARAN

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, beberapa saran dapat diberikan. Bagi pemerintah desa, disarankan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperkuat kompetensi aparatur melalui pelatihan atau sosialisasi kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, pemerintah desa juga perlu membangun kepercayaan masyarakat agar program-program desa dapat terealisasi dengan dukungan aktif dari masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian ini dengan mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti pelatihan, tingkat pendidikan, dan ketaatan dalam pelaporan keuangan. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel atau desa yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Donaldson and J. H. Davis, "Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns," *Australian Journal of Management*, 1991.
- [2] K. Restu Aprilya, "Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal ilmu ekonomi dan riset akuntansi*, e-ISSN: 2460-0585, 2018.
- [3] Kushandajani, "Kewenangan Desa Dan Penyelenggara Pemerintah Desa," *Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip, Universitas Diponegoro*, 2018.
- [4] Mada et al., "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo," *Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi*, 2017.
- [5] M. Suziani, "Pengaruh Hasil Pelatihan, Motivasi Berprestasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kompetensi Fasilitator Family Development Session (FDS) (Survey Terhadap Peserta Pelatihan FDS BBPPKS Regional II)," 2017.
- [6] Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-2, 2014.
- [7] N. Nurkhasanah, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Doctoral Dissertation, UIN Walisongo*, 2019.
- [8] Pangestu, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Perhutanan Sosial (Studi Kasus di KPH Cianjur, Jawa Barat)," *Tesis, Institut Pertanian Bogor*, 1995.
- [9] A. Patimah, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kertaraharja, Bojongraharja, Bojong, Bojongkembar Kecamatan)," 2019.
- [10] T. Rismawati, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi,

- Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," 2019.
- [11] S. Umaira and Adnan, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 4, no. 3, pp. 471-481, 2019.
- [12] S. Atiningsih et al., "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, vol. 10, no. 1, Mei 2019.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2017; Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- [14] W. Banga, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan pertama, 2017.
- [15] D. Yesinia et al., "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang," *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, vol. 10, no. 1, 2018.
-